

TESIS
**OPTIMALISASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH (KKP) DAN CASH MANAGEMENT SYSTEM
VIRTUAL ACCOUNT (CMS VA) SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN BELANJA NEGARA
PADA SATKER PUSBANGKOM MANAJEMEN
BPSDM KEMENTERIAN PUPR**

Disusun oleh :

NAMA : RUSMAYANTHY
NPM : 2143021056
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M. Tr. A.P)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Rusmayanthi
NPM : 2143021056
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia): Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah (KKP) dan *Cash Management System
Virtual Account (CMS VA)* Sebagai Alat
Pembayaran Negara Pada Satker Pusbangkom
Manajemen BPSDM Kementerian PUPR.
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Optimization The Use of Government Credit
Cards and Cash Management System Virtual
Account (CMS VA) as State Payment Tools in
Management Competency Development Centers,
Ministry of Public Works and Housing.*

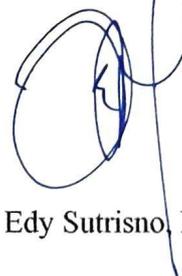
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. R. Luki Karunia, MA.)

Pembimbing II



(Dr. Edy Sutrisno, M. Si.)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

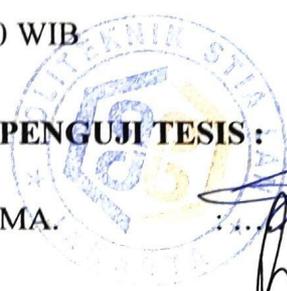
Nama : Rusmayanthy
NPM : 2143021056
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan *Cash Management System Virtual Account (CMS VA)* Sebagai Alat Pembayaran Negara Pada Satker Pusbangkom Manajemen BPSDM Kementerian PUPR.

Telah mempertahankan tesis dihadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023
Pukul : 12.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS :

Ketua Sidang : Dr. Hamka, MA. :
Sekretaris : Dr. Ridwan Rajab, M. Si. :
Anggota : Dr. Asropi, M. Si. :
Pembimbing 1 : Dr. R. Luki Karunia, MA. :
Pembimbing 2 : Dr. Edy Sutrisno, M. Si. :



(Handwritten signatures in blue ink over the stamp and signature lines)

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rusmayanthy
NPM : 2143021056
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul “ OPTIMALISASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) DAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM VIRTUAL ACCOUNT (CMS VA)* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NEGARA PADA SATKER PUSBANGKOM MANAJEMEN BPSDM KEMENTERIAN PUPR ”, merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Mei 2023

Penulis,



Rusmayanthy.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji dan syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Izin, Rahmat serta HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul “OPTIMALISASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) DAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM VIRTUAL ACCOUNT (CMS VA)* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NEGARA PADA SATKER PUSBANGKOM MANAJEMEN BPSDM KEMENTERIAN PUPR”.

Penyusunan Tugas Akhir atau Tesis ini dimaksudkan agar dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu terapan Manajemen Keuangan Negara khususnya pada implementasi dan optimalisasi penggunaan alat pembayaran negara secara non tunai “*cashless*” dalam hal ini yaitu dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan *Cash Management System Virtual Account (CMS VA)* di Lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen BPSDM Kementerian PUPR, serta penulis berharap agar tesis ini juga dapat bermanfaat bagi semua pembaca khususnya para pelaksana anggaran di Kementerian/Lembaga.

Dalam menyusun tesis ini, penulis mendapat banyak bimbingan dan arahan yang sangat membantu dari Bapak Dr. R. Luki Karunia, MA dan Bapak Dr. Edy Sutrisno, M. Si, selaku Dosen Pembimbing penulis yang begitu baik, pengertian, sabar serta penuh dedikasi dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini, terima kasih banyak penulis haturkan untuk para Dosen Pembimbing. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun penulis sangat harapkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sehingga tesis ini akan lebih bermanfaat.

Akhir kata, tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan tesis ini, terkhusus kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;

2. Bapak Ir. Moeh. Adam, MM. selaku Kepala Pusbangkom Manajemen BPSDM Kementerian PUPR;
3. Bapak Drs. Hery Wardoyo, M. Kom. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusbangkom Manajemen;
4. Rekan - rekan di bagian Keuangan Subag TU Satker Pusbangkom Manajemen yang telah membantu dan memberikan dukungan sejak awal penelitian sampai tesis ini selesai;
5. Seluruh keluarga penulis (Orang tua, suami, saudara, dan anak-anak) tercinta yang senantiasa mendoakan serta memberi motivasi dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Seluruh rekan - rekan MKN Angkatan 2021 yang selalu saling membantu, saling menyemangati dan berbagi pengetahuan;
7. Terakhir, kepada Jeon Jungkook dan Lee Haechan yang selalu menghibur dan menginspirasi semangat pantang menyerah kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan, dukungan dan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis. Semoga kita semuanya senantiasa sehat, penuh limpahan Rahmat dan Karunia Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin.

Jakarta, 2023

Penulis,

Rusmayanthi.

ABSTRAK
**OPTIMALISASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH
(KKP) DAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM VIRTUAL ACCOUNT*
(*CMS-VA*) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NEGARA
PADA SATKER PUSBANGKOM MANAJEMEN BPSDM
KEMENTERIAN PUPR**

Rusmayanthi
anthyzackyayn24@gmail.com
Pusbangkom Manajemen BPSDM PUPR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan KKP dan *CMS VA* di Pusbangkom Manajemen BPSDM Kementerian PUPR, faktor-faktor yang menyebabkan penggunaannya belum berjalan optimal, serta strategi apa saja yang dapat disusun untuk mengoptimalkan penggunaan dan realisasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada 5 orang key informan, observasi langsung dan dokumentasi kemudian dilakukan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penggunaan alat pembayaran non tunai berupa KKP dan CMS VA di Satker Pusbangkom Manajemen BPSDM Kementerian PUPR realisasinya masih sangat rendah yaitu 2% dari DIPA dimana jika dihitung kemampuan atau kapasitasnya dapat mencapai minimal 11% dalam setahun, hal ini menunjukkan bahwa pemakaian uang tunai masih tinggi dan menimbulkan berbagai dampak seperti temuan pengelolaan kas oleh auditor BPK. Belum optimalnya penggunaan KKP dan CMS VA disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal, beberapa diantaranya yaitu belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Pimpinan serta biaya tambahan dari merchant toko atau penyedia. Penelitian ini merekomendasikan 5 langkah Strategi sebagai upaya optimalisasi yaitu : 1) Pendataan Ulang Pemegang KKP dan CMS VA, 2) Penetapan Target Penggunaan, 3) Menerbitkan SOP dan Nota Dinas, 4) Penguatan SDM, dan 5) Melakukan Monev secara berkala.

Kata Kunci : Optimalisasi, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Cash Management System Virtual Account (CMS VA), Non Tunai.

ABSTRACT
**OPTIMIZATION THE USE OF GOVERNMENT CREDIT CARDS AND
CASH MANAGEMENT SYSTEM VIRTUAL ACCOUNT (CMS-VA) AS
STATE PAYMENT TOOLS
IN MANAGEMENT COMPETENCY DEVELOPMENT CENTERS,
MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING**

Rusmayanthi
anthyzackyazayn24@gmail.com
Management Competency Development Centers,
Ministry Of Public Works and Housing.

This study aims to find out how the implementation of the use of Government Credit Card and CMS VA in Management Competency Development Centers, Ministry of Public Works and Housing, what factors cause their use to not run optimally, and what strategies can be developed in order to optimize their use and realization. This research is a qualitative research, using primary and secondary data sources with data collection techniques in the form of interviews with 5 key informants, direct observation and documentation then carried in triangulation. The results of the study shows that the implementation of the use of non-cash payment instruments such as Government Credit Card and CMS VA in Management Competency Development Centers, Ministry of Public Works and Housing is still very low in realization at 2% of DIPA (budget implementation), where if we calculated the ability or capacity can reach at least 11% in a year, this shows that the use of cash is still high and cause various impacts such as findings in cash management by the BPK's auditor. The non-optimal use of KKP and CMS VA is caused by several internal and external factors, some of the causes are the absence of Standard Operating Procedures (SOP) set by the Leaders and surcharge from shop merchants or providers. This study recommends 5 strategic steps as a form of optimization, namely: 1) Re-data collection of KKP and CMS VA holders, 2) Setting targets for use, 3) Issuing SOPs and official notes, 4) Strengthening human resources, and 5) Conducting periodic monitoring and evaluation.

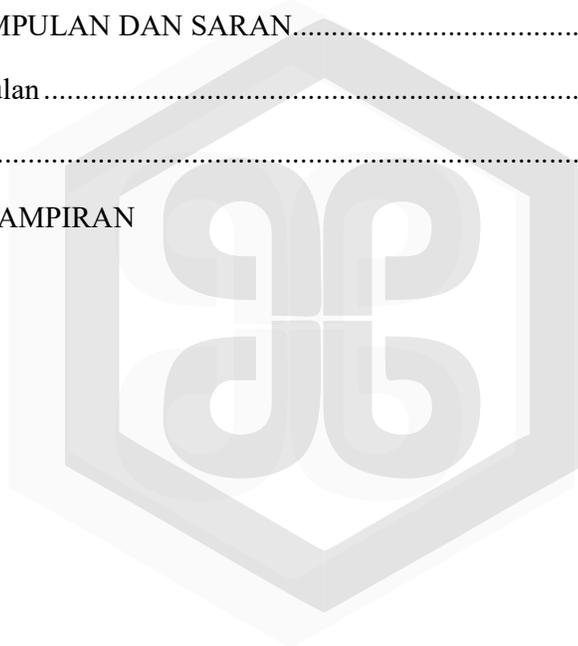
Key Words : *Optimization, Government Credit Card, Cash Management System Virtual Account (CMS VA), Non cash.*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL TESIS.....	i
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	33
1. Tinjauan Kebijakan.....	33
a. Keuangan Negara.....	33
b. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Perbendaharaan	34
c. Uang Persediaan (UP)	40

d. Kartu Kredit Pemerintah (KKP)	41
e. <i>Cash Management System Virtual Account (CMS VA)</i>	45
f. <i>Digital Payment – Marketplace</i>	47
2. Tinjauan Teoritis	47
a. Optimalisasi	47
b. Administrasi Publik	50
c. Implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya	52
d. Alat Pembayaran	56
e. Pelaksanaan Anggaran	58
f. Strategi	58
C. Kerangka Berpikir	62
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	64
A. Metode Penelitian	64
B. Teknik Pengumpulan Data	65
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	69
D. Instrumen Penelitian	70
BAB IV HASIL PENELITIAN	71
A. Deskripsi Objek	71
1. Gambaran Umum Pusbangkom Manajemen BPSDM PUPR	71
2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi	73
a. Tugas dan Fungsi Organisasi (Mandate Organisasi)	73
b. Struktur Organisasi	74
B. Deskripsi Hasil Penelitian	76
1. Implementasi Penggunaan KKP dan <i>CMS VA</i>	77

2. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Belum Optimalnya Penggunaan KKP dan CMS VA	85
3. Strategi Optimalisasi Peningkatan Penggunaan KKP dan CMS VA	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	124
a. Kesimpulan	124
b. Saran.....	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Besaran UP antar Satker BPSDM PUPR TA. 2021	5
Tabel 1. 2 Persentase Realisasi UP Tunai TA. 2017 sd 2021	5
Tabel 1. 3 Persentase Realisasi LS Bendahara dibayarkan tunai TA. 2017 sd 2021	6
Tabel 1. 4 Realisasi Penggunaan KKP TA. 2019 sd 2021	10
Tabel 3. 1 <i>Key Informant</i> Penelitian	67
Tabel 4. 1 Rekap Jumlah Pejabat dan Petugas Kesatkeran	77
Tabel 4. 2 Daftar Pemegang KKP dan CMS VA Pusbangkomen	83
Tabel 4. 3 Realisasi KKP di Tahun 2022.....	83
Tabel 4. 4 Anggaran Peningkatan Kompetensi SDM Tahun 2020-2021 Pusbangkomen	90
Tabel 4. 5 Identifikasi SWOT faktor yang mempengaruhi belum optimalnya KKP&CMS VA	106

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pusbangkom Manajemen	74
Gambar 1. 2 Alur Implementasi KKP.....	79
Gambar 1. 3 Alur Implementasi CMS VA	80
Gambar 1. 4 Transaksi Pembayaran Hotel Perjadin Menggunakan KKP.....	82
Gambar 1. 5 KKP dan Kartu Debit VA Pada Satker Pusbangkom Manajemen.....	86
Gambar 1. 6 Billing KKP Bulan Februari dan Maret 2022 Pusbangkom Manajemen	87
Gambar 1. 7 Surat Temuan BPK Terkait Pemeriksaan Kas Bendahara TH. 2021	92
Gambar 1. 8 Himbauan Mengurangi Penggunaan Uang Tunai - SAKTI	93
Gambar 1. 9 Paparan Raker BPSDM Th 2022 & Pembahasan Temuan BPK.....	94
Gambar 1. 10 Pengenaan Biaya Surcharge dari Penyedia atas Pembayaran KKP	103
Gambar 1. 11 Rapat Pembahasan Internal atas Temuan Pemeriksaan BPK RI.....	105
Gambar 1. 12 langkah-langkah Strategi Optimalisasi Penggunaan KKP dan CMS VA	107
Gambar 1. 13 FGD Pembahasan SPIP dan Pengelolaan Kas Bendahara	111
Gambar 1. 14 Wawancara dengan Ka.Subag TU Selaku PPK Satker	112

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Dalam proses penyelenggaraan suatu negara hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh adalah aspek Keuangan Negara. Sebagaimana amanat pada Undang-Undang Tahun 1945 yang menyatakan bahwa air, bumi dan juga segala kekayaan alam yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai sepenuhnya oleh negara Indonesia dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Amanat ini memiliki arti bahwa Pemerintahan Indonesia sebagai penyelenggara negara telah diberikan mandat untuk mengelola seluruh aset-aset negara. Aset-aset serta pendapatan dalam pengelolaan negara tersebut kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat. Tentunya tidak mudah untuk mencapai cita-cita dan tujuan tersebut, namun pemerintah terus optimis dan berupaya dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan dalam keuangan negara kearah yang lebih baik serta mengikuti perkembangan jaman melalui sistem yang lebih modern.

Dalam konsep Keuangan Negara, Presiden RI sebagai kepala pemerintahan yang berarti merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Pengelolaan Keuangan Negara mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawabnya kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga sebagai Pembantu Presiden. Dalam hal ini, dilakukan pemisahan antara pemegang tugas kewenangan kebhendaharaan dan kewenangan administratif (UU No. 17 Th. 2003 Terkait Keuangan Negara, 2003). Tanggung jawab urusan kebhendaharaan negara diberikan kepada Menteri Keuangan selaku *Chief Financial Officer* (CFO) sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), dan tanggung jawab urusan tata negara kepada menteri dan pimpinan lembaga teknis lainnya yaitu *Chief Operating Officer* (COO) sebagai Pengguna Anggaran (PA). Pemisahan tugas ini bertujuan agar setiap K/L dapat meningkatkan

profesionalisme sesuai dengan bidang tugas institusinya masing masing dan diwujudkan dalam penyelenggaraan keuangan negara yang akuntabel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau biasa disebut APBN merupakan bagian penting dari perekonomian negara karena memuat rencana pendapatan dan belanja negara dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Undang-Undang APBN. Salah satu fungsi APBN yaitu memiliki fungsi otorisasi dimana anggaran negara yang telah ditetapkan adalah sebagai dasar dalam menjalankan pelaksanaan anggaran.

Penetapan dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan selaku BUN merupakan awal alur pelaksanaan anggaran, kemudian Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) diberikan pada para Menteri dan Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai dasar hukum dan acuan dalam Pelaksanaan APBN. Kemudian sebagai perpanjangan tangan atas fungsi perbendaharaan dari masing-masing wilayah kerja di pusat dan daerah, Kemenkeu dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Kanwil DJPB dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing yang berperan sebagai kuasa BUN.

Demikian halnya dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga pada tingkat Satuan Kerja mendelegasikan kewenangan perikatannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan fungsi kebhendaraan satuan kerja kepada Bendahara Pengeluaran, maksudnya yaitu Menteri atau Pimpinan Lembaga dapat menunjuk pengelola dana belanja sebagai Bendahara Pengeluaran untuk pemenuhan anggaran di kantor atau unit kerja. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas Kementerian/Lembaga, Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja dapat diberikan uang muka yang disebut Uang Persediaan (UP), yang kemudian dikelola oleh

Bendahara Pengeluaran.(Undang Undang RI No. 01 mengenai Perbendaharaan Negara, 2004)

Satker Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen merupakan Unit Organisasi Eselon II dibawah Badan Pengembangan SDM (Eselon I) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), mempunyai tanggung jawab dan tugas dalam menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi ASN PUPR di Bidang Manajemen Umum dan Bidang Manajemen Konstruksi serta Pengembangan Kompetensi melalui penyelenggaraan beasiswa / karyasiswa ASN PUPR. Sehingga dari tuis tersebut dapat kita ketahui bahwa satker Pusbangkom Manajemen dalam Perjanjian Kinerja serta Pelaksanaan Anggaran yang tertuang dalam DIPA nya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum dan Modul, Penyelenggaraan Pelatihan, Pengembangan Kompetensi bagi para Widyaiswara PUPR, Kerjasama Pendidikan Kedinasan, Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Perkantoran dimana masing-masing kegiatan tersebut memiliki target output yang harus dicapai sebagai indikator penilaian kinerja satuan kerja.

Sehubungan dengan pelaksanaan anggaran pada kegiatan Satker Pusbangkom Manajemen, Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran (PA) Kementerian telah menetapkan Pejabat Perbendaharaan Kesatkeran diantaranya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri atas PPK I dan PPK II, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Petugas yang menangani Belanja Pegawai (PPABP), jabatan jabatan tersebut adalah selaku pengelola dan penanggung jawab pelaksanaan anggaran. Kemudian secara internal KPA menetapkan Pejabat Pengadaan, Staf Pengelola Keuangan, serta Tim lainnya yang dianggap perlu dalam mendukung lancarnya kegiatan satuan kerja.

Selanjutnya dalam proses pembayaran kegiatannya atau pembebanan tagihan APBN, Satker Pusbangkom Manajemen menggunakan 2 (dua) prosedur pembayaran yaitu dengan prosedur pembayaran langsung (LS) dan prosedur

pembayaran melalui Uang Persediaan (UP), dimana jika melalui prosedur LS, pembayaran dari kas negara (BUN) akan langsung masuk ke rekening penerima/rekanan. Namun, jenis pembayaran LS yang diterapkan ini sebenarnya terbagi lagi atas 3 jenis yaitu LS ke Pihak Ketiga/Penyedia, LS ke Rekening Pegawai, dan LS ke Rekening Bendahara. Prosedur pembayaran lainnya adalah melalui mekanisme UP, yaitu dana APBN dari kas negara akan masuk ke Rekening Bendahara Pengeluaran terlebih dahulu kemudian akan dikelola dan ditarik oleh Bendahara untuk membayar kebutuhan operasional kantor kepada pihak penerima secara tunai. Sehingga dalam pengelolaan kasnya yang terdiri atas kas bank dan kas tunai, Bendahara Pengeluaran Satker memiliki 2 tugas yaitu dalam pengelolaan kas UP dan kas LS Bendahara.

Pengelolaan dana UP Pada Satker Pusbangkom Manajemen dalam 5 Tahun terakhir nilainya sama dan tergolong besar karena merupakan batasan tertinggi dalam besaran UP yang diberikan oleh BUN, dimana untuk satker dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP apabila nilainya melebihi Enam Miliar Rupiah maka dapat diberikan UP maksimal Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga satkerpun mengajukan nilai maksimal UP yang sama dari tahun ke tahun, padahal sebelum diajukan kembali nilai ini bisa dievaluasi atau dikaji lagi sudah tepat atau belum penggunaannya selama ini, pertimbangan lainnya adalah pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi transaksi tunai sejak tahun 2018. (PMK Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, 2018.)

Perbedaan nilai UP yang cukup besar itupun terlihat pada (Tabel 1.1) dibawah ini, setelah disandingkan dengan dengan 4 satker lain yang berada dalam lingkup Eselon I yang sama (BPSDM Kementerian PUPR) yang juga mengelola dana UP, dimana pada satker lain pagu DIPA nya bahkan lebih besar dibandingkan dengan Satker Pusbangkom Manajemen, namun mereka memilih untuk mengajukan atau mengelola nilai UP yang lebih kecil.

Tabel 1. 1 Perbandingan Besaran UP antar Satker BPSDM
PUPR TA. 2021

No.	Kode Satker	Nama Satker	Pagu DIPA 2021	Nilai UP Satker
1.	400835	Pusbangkom Manajemen	Rp 27.141.994.000	Rp 500.000.000
2.	400836	Pusbangkom SDA & Permukiman	Rp 50.610.891.000	Rp 200.000.000
3.	400837	Pusbangkom JPPIW	Rp 42.602.917.000	Rp 200.000.000
4.	400935	Bapekom Wil. III Jakarta	Rp 41.962.836.000	Rp 120.000.000
5.	400947	Balai Penilaian Kompetensi	Rp 25.000.268.000	Rp 120.000.000

Sumber : Website Emonitoring PUPR (Pagu BPSDM) TA. 2021

Kemudian, berdasarkan data Pada Buku Pembantu UP Silabi, diketahui realisasi penggunaan UP Tunai dalam 5 tahun terakhir Pada Satker Pusbangkom Manajemen rata-rata diatas 24,5% (Tabel 1.2) dari total pagu DIPA (setelah dikurangi Belanja Pegawai), yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Persentase Realisasi UP Tunai TA. 2017 sd 2021

No.	Tahun Anggaran	(Nilai Total Pagu DIPA-Pagu Belanja Pegawai 51)	Nilai realisasi anggaran yang dibayarkan melalui UP Tunai	(%) dari Pagu DIPA -51	Besaran UP yang diajukan Satker dan disetujui oleh KPPN
1.	2017	Rp 27.986.896.000	Rp 5.591.115.813	19,98	Rp 500.000.000
2.	2018	Rp 24.040.552.000	Rp 4.939.525.357	20,55	Rp 500.000.000
3.	2019	Rp 24.283.396.000	Rp 5.875.147.676	24,19	Rp 500.000.000
4.	2020	Rp 20.305.272.000	Rp 6.810.531.713	33,54	Rp 500.000.000
5.	2021	Rp 19.506.396.000	Rp 4.481.355.546	22,97	Rp 500.000.000

Sumber : Data BP UP SILABI dan Surat Persetujuan UP TA. 2017 – 2021

Selain itu, berdasarkan data pada Buku Pembantu LS Bendahara Silabi, realisasi LS Bendahara yang dibayarkan secara tunai dalam 5 tahun terakhir Pada Satker Pusbangkom Manajemen rata-rata diatas 10,5% (Tabel 1.3) dari total pagu DIPA (setelah dikurangi Belanja Pegawai), yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Persentase Realisasi LS Bendahara dibayarkan tunai TA. 2017 sd 2021

No.	Tahun Anggaran	(Nilai Total Pagu DIPA-Pagu Belanja Pegawai 51)	Nilai realisasi LS Bendahara yang dibayarkan secara Tunai	(%) dari Pagu DIPA-51
1.	2017	Rp 27.986.896.000	Rp 2.858.800.968	10,21
2.	2018	Rp 24.040.552.000	Rp 1.931.741.980	8,04
3.	2019	Rp 24.283.396.000	Rp 3.654.805.312	15,05
4.	2020	Rp 20.305.272.000	Rp 1.581.738.228	7,79
5.	2021	Rp 19.506.396.000	Rp 2.409.133.655	12,35

Sumber : Data BP LS BEND SILABI TA. 2017 – 2021

Berdasarkan kedua tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa jika diakumulasikan maka dalam satu tahun, Bendahara Pengeluaran Satker Pusbangkom Manajemen mengelola peredaran uang tunai rata-rata sebesar 35% dari total pagu DIPA setelah dikurangi pagu Belanja Pegawai (gaji induk, tunjangan, uang makan, uang lembur), jika dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp 8 Miliar dalam setahun. Jumlah peredaran uang tunai tersebut sangat besar, dan dapat menimbulkan berbagai risiko seperti potensi kehilangan pada saat penarikan di bank dan pada saat disimpan di brankas kantor dimana kejadian tersebut sebelumnya pernah dialami oleh satker lain yang masih berada dalam satu wilayah perkantoran dengan Pusbangkom, potensi *fraud* (kecurangan) dalam bertransaksi secara tunai dimana jika tidak mendapat pengawasan yang ketat, maka uang tunai yang dikelola bisa disalahgunakan untuk keperluan lain, potensi *idle cash* (uang tunai menganggur di brankas) kas menganggur ini terlihat di beberapa kondisi saldo harian bendahara, potensi menjadi temuan audit Itjen ataupun BPK saat diadakannya pemeriksaan atau *opname cash*, hal ini telah terbukti pada saat audit tahun 2021 dimana terdapat kondisi kas menganggur dan nilainya diatas Rp 50 juta, serta berbagai dampak negatif lainnya.

Hal tersebut tentu menimbulkan berbagai pertanyaan mengapa Satker Pusbangkom Manajemen cenderung atau lebih suka mengelola uang tunai dengan nilai besar ? apakah organisasi belum membuka diri untuk melakukan perubahan ?

apakah organisasi sudah berniat melakukan perubahan namun belum paham dan tidak update akan regulasi terkait pengelolaan kas ? apakah organisasi sudah tahu terkait regulasi yang baru, telah diimplementasikan namun mengalami kendala dalam tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban transaksi non tunai ? kemudian permasalahan tersebut menjadi “*stuck*” dan tidak ditindaklanjuti, ataukah baik pegawai ataupun stakeholder lebih suka menerima pembayaran secara tunai sehingga kebiasaan membayar secara konvensional menjadi sulit untuk dihilangkan. Peneliti merasa hal ini penting untuk dikaji, dan dilakukan langkah tidak lanjut serta perbaikan. Pada prinsipnya tidak menjadi persoalan jika nilai UP yang dikelola sebuah satker besar, selama telah mendapat persetujuan BUN, memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan baik itu dari segi besarnya pagu yang dikelola serta dengan melakukan revolving secara tepat waktu. Namun disisi lain, saat ini satker-satker di K/L juga diminta untuk bisa meminimalisir penggunaan uang tunai, sehingga UP yang besar harus diimbangi juga dengan metode pembayaran yang aman dalam hal ini *cashless*.

Sampai akhir tahun anggaran 2018 Bendahara Pengeluaran Satker Pusbangkom Manajemen masih mengelola Uang Persediaan (UP) dan LS Bendahara yang seluruhnya dibayarkan secara tunai. Sehingga, aktivitas penarikan uang tunai di Bank oleh Bendahara Pengeluaran telah menjadi rutinitas sehari-hari yang cukup melelahkan, menyita waktu dan tentunya menimbulkan perasaan was-was karena tingkat keamanan yang rendah. Diperlukan sistem pembayaran yang lebih modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi agar pembayaran tagihan Negara dapat dilakukan lebih aman, akuntabel, efektif dan efisien.

Pemerintah terus membenahi tata cara pembayaran APBN dan membenahan sistem pembayaran yang memudahkan pekerjaan bendahara unit kerja di Kementerian/Lembaga. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Terkait Penyelenggaraan APBN, mengubah ketentuan penggunaan dan pembayaran UP

yang tadinya dilakukan dengan cara tunai berubah menjadi UP tunai dan UP KKP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.196/PMK/05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP dan Peraturan Menteri Keuangan No.183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran milik Kementerian/Lembaga, yang mengubah Rekening Satuan Kerja dari Giro menjadi *Virtual Account* dan dilengkapi dengan fasilitas *Cash Management System VA* (CMS VA), serta *Piloting Digital Payment-Marketplace* berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 20/PB/2019.

Mengapa Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut dan berupaya memoderenisasi sistem pembayaran pada Instansi Pemerintah dengan menggunakan KKP dan CMS VA yang berfungsi sebagai alat pembayaran belanja negara ? karena pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu dan sistem tersebut memiliki banyak manfaat yaitu :

1. Memberi kemudahan dalam transaksi pembayaran tagihan negara karena prosesnya lebih cepat dibandingkan pembayaran konvensional;
2. Untuk mengurangi penggunaan uang tunai;
3. Untuk mengurangi *idle cash* atau kas menganggur pada brankas;
4. Tingkat keamanan lebih tinggi;
5. Transaksi bersifat *real time* sehingga lebih transparan serta dapat dimonitor oleh Eselon I, DJPB Kemenkeu, APIP, dan BPK.
6. Mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan (*fraud*) seperti transaksi fiktif;
7. Berpartisipasi dalam peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
8. Mengurangi biaya operasional dalam pemakaian Uang Persediaan.

Sehingga, pada Tahun 2019 Satker Pusbangkom Manajemen berupaya melakukan penyesuaian dalam mendukung program percepatan implementasi transaksi non tunai K/L tersebut dengan mengacu pada regulasi terbaru yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dimulai dengan Melakukan Perjanjian

Kerjasama dengan Bank Mitra dalam penerbitan KKP, mengajukan permohonan UP dengan Total Rp. 500.000.000,- dimana Proporsi UP Tunai sebanyak 60% yaitu senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan UP KKP sebanyak 40% yaitu senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada KPPN, mengimplementasikan penggunaan KKP, menutup rekening giro Satker Pada Tahun 2020, mengajukan persetujuan pembukaan rekening *Virtual Account* Satker, serta menggunakan fasilitas *Cash Management System Virtual Account (CMS VA)* di Tahun 2021.

Dalam perjalanan perubahan sistem pembayaran yang lebih modern ini tidaklah mudah. Meskipun DJPB/KPPN gencar melakukan sosialisasi, pada kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi Satker dalam implementasinya dilapangan, diantaranya yaitu :

1. Tidak adanya Juknis atau SOP yang secara detail menjelaskan tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban KKP dan CMS VA. Menurut sudut pandang penulis hal ini disebabkan karena pada arahan regulasinya, penyusunan SOP sepenuhnya diserahkan kepada KPA / Satker, padahal penerapan modernisasi pembayaran ini merupakan hal baru yang sebaiknya diberikan template terlebih dahulu atau penjelasan yang lebih spesifik dalam aturannya, aturannya saja belum tentu langsung dipahami apalagi satker harus langsung Menyusun SOP, satker merasa pemahamannya belum cukup untuk sampai ditahap itu. Sinergi antara Kemenkeu dan K/L lain dalam menyusun SOP dari awal mestinya lebih intens dan dilakukan pendampingan agar tidak salah menafsirkan tata cara penggunaannya;
2. Belum siapnya kompetensi SDM yang mendukung jalannya program ini;
3. Sulitnya mengubah *mindset* pihak-pihak yang selama ini terbiasa dan lebih suka menerima pembayaran secara tunai;
4. Selain itu, terdapat kendala teknis juga seperti adanya biaya tambahan / *charge* dari pemakaian KKP, terbatasnya mesin *Electronic Data Capture (EDC)*, serta beberapa permasalahan lainnya.

Akan tetapi, diluar kendala yang dihadapi tidak dipungkiri bahwa dengan adanya KKP dan CMS VA, Satker Pusbangkom Manajemen ikut merasakan dampak positif dari modernisasi sistem pembayaran belanja negara. Pegawai di satker mulai terbiasa menggunakannya dalam perjalanan dinas seperti pembayaran hotel, pembelian tiket pesawat, kereta, dan travel. KKP Operasional dan Modal digunakan oleh Pejabat Pengadaan untuk keperluan belanja bahan, belanja langganan daya dan jasa, Pengadaan Peralatan Mesin, Servis KDO, serta dalam penanganan pandemi covid-19 digunakan untuk membeli masker, vitamin untuk para pegawai.

Jika melihat progres realisasi penggunaan KKP di Satker Pusbangkom Manajemen, nampak adanya peningkatan dari TA. 2019 sd TA. 2021 (Tabel 1.4).

Tabel 1. 4 Realisasi Penggunaan KKP TA. 2019 sd 2021

No.	Tahun Anggaran	Nilai Realisasi KKP	% (DIPA - Pagu 51)
1.	2019	Rp 156.393.140	0,64
2.	2020	Rp 449.673.695	2,21
3.	2021	Rp 512.717.613	2,63

Sumber : Data BP UP KKP SILABI TA. 2019 – 2021

Namun peningkatan tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan, berdasarkan tabel diatas bila dibandingkan dengan pembayaran secara tunai persentase pembayaran melalui KKP sangatlah kecil yaitu 2% dari nilai DIPA, seharusnya jika dimaksimalkan pemakaiannya bisa mencapai 10 sd 15% dari nilai DIPA. Diketahui limit KKP yang tersedia atau yang bisa digunakan tiap bulannya oleh Satker adalah sebesar Rp 200.000.000, nilai realisasi diatas bahkan tidak mencapai optimalisasi dari separuh limit yang ada, berikut simulasi perhitungannya : $Rp\ 200.000.000 \times 50\% = Rp\ 100.000.000$ apabila dioptimalkan pemakaian KKP setiap bulannya minimal 50% maka bisa mencapai realisasi 12 bulan dikali dengan $Rp\ 100.000.000 = Rp\ 1.200.000.000,-$.

Selain belum optimalnya penggunaan KKP, disisi lain Satkerpun harus mengoptimalkan penggunaan CMS VA. Pemanfaatan dari CMS VA berjalan

lambat, baru dimulai pada awal Tahun 2021 digunakan hanya sebatas pengecekan saldo rekening dan pencetakan rekening koran satker, kemudian secara perlahan belajar menggunakan kartu debit, dan pembayaran UP dan LS Bendahara melalui transfer.

Permasalahan lainnya adalah Satker Pusbangkom Manajemen sama sekali belum memanfaatkan aplikasi *Digipay-Marketplace* dalam pengelolaan UP nya. *Digipay* sebagai salah satu *platform* milik BUN yang memiliki fungsi untuk melakukan integrasi antara 3 (tiga) transaksi, yaitu pengadaan barang dan jasa, melakukan pembayaran, dan juga perpajakan dalam sebuah kesatuan ekosistem. Pembayaran atas transaksi *Digipay* dilakukan secara *cashless*/non tunai dengan menggunakan KKP dan CMS VA.

Pada Audit LK TA. 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Satker Pusbangkom Manajemen BPSDM PUPR terdapat temuan terkait pengelolaan Kas Bendahara Pengeluaran, dimana selama Tahun 2021 Bendahara Pengeluaran tercatat sebanyak 29 Kali / 29 Hari kerja melakukan penyimpanan uang tunai di brankas dengan saldo melebihi Rp 50.000.000 dan tidak dibuatkan BA atau berita acara kas melebihi Rp 50 Juta yang diketahui/ditandatangani oleh KPA atau PPK serta Bendahara Pengeluaran, dimana BA ini merupakan salah satu bukti pengawasan yang didalamnya selain tanggal, rincian pecahan uang juga memuat penjelasan urgensi mengapa bendahara harus menyimpan uang tunai melebihi batas nilai yang telah ditetapkan dan siapa saja yang bertanggungjawab, tanpa adanya BA tersebut maka pengelolaan kas dianggap bertentangan dengan aturan yang berlaku. Sehingga BPK meminta Pimpinan yang lebih tinggi harus menerbitkan surat teguran kepada petugas dan pejabat terkait agar tidak mengulangi kelalaian pada audit berikutnya karena temuan ini dapat menimbulkan potensi terjadinya penyalahgunaan tugas dan wewenang atau kehilangan atas kas tunai.

Kemudian pada Audit kinerja anggaran semester I TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR terhadap Satker Pusbangkom Manajemen BPSDM PUPR juga terdapat temuan terkait pengadaan peralatan perkantoran yang dinilai tidak ekonomis dan berpotensi terjadinya pemborosan uang negara dikarenakan dilakukan secara pengadaan langsung tidak melalui e-purchasing, e-marketplace atau digipay, dimana setelah tim Itjen melakukan penelusuran dan pengecekan harga, ditemukan bahwa apabila dibeli melalui e-marketplace satker bisa mendapatkan harga terjangkau dengan selisih harga yang jauh lebih murah senilai Rp 44.289.141,- untuk spesifikasi barang yang sama. Sebagaimana kita ketahui pula bahwa belanja barang dengan menggunakan KKP dalam hal ini instansi pemerintah tidak dibebankan kewajiban memungut PPN dan PPh 22, hal tersebut menjadi salah satu keunggulan dalam pemanfaatan KKP baik itu melalui digipay ataupun platform lainnya.

Selain hasil audit Tahun 2021 dan Tahun 2022, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu di Tahun 2022 juga menerbitkan Nota Dinas Nomor ND-2/PB.2/2022 Perihal “Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai upaya pencapaian target transaksi dan akselerasi realisasi belanja K/L” dimana didalam Nota Dinas tersebut diperintahkan kepada seluruh Kepala KPPN untuk mengidentifikasi kembali keseluruhan satuan kerja pada Kementerian/Lembaga yang menggunakan KKP, dan bagi Satker yang telah menggunakan KKP agar ditegaskan kembali untuk mengimplementasikan KKP sebagai alat pembayaran transaksi belanja pemerintah khususnya dalam melakukan kegiatan perjalanan dinas dan operasional sehari-hari kantor serta bagi Satker yang belum menggunakan KKP, agar dapat dilakukan pembinaan dan/atau melakukan pemotongan nilai UP KKP sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari total proporsi UP KKP yang telah mendapatkan persetujuan dari KPPN seperti yang disebutkan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018. Nota Dinas tersebut merupakan bentuk komunikasi internal lingkup Kemenkeu yang semakin memperkuat bahwa pemerintah dalam hal ini BUN terus mendorong Satker agar mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.

Nilai Uang Persediaan Tunai yang besar, lambatnya progres penggunaan KKP, kurangnya pemanfaatan CMS VA, adanya temuan BPK terkait pengelolaan Kas harian Bendahara Pengeluaran, adanya temuan Itjen terkait indikasi pemborosan belanja negara karena tidak memanfaatkan platform elektronik (e-marketplace, digipay) Pada Satker Pusbangkom Manajemen BPSDM PUPR, serta berbagai regulasi dan surat himbauan dari DJPB Kementerian Keuangan kepada seluruh K/L di Indonesia dalam hal optimalisasi KKP dan CMS VA, merupakan gambaran bahwa saat ini tingkat penggunaan uang tunai masih tinggi dalam pengelolaan Uang Persediaan ataupun Pendistribusian LS Bendahara, dan pada Satker Pusbangkom Manajemen sendiri hal ini terbukti dengan data yang telah dipaparkan sebelumnya. Sehingga dari fenomena tersebut terkesan bahwa organisasi belum begitu tergerak untuk melakukan perubahan ke sistem pembayaran non tunai yang prosesnya lebih transparan, lebih cepat, aman dan modern. Penulis merasa perlu melakukan penelitian akan permasalahan-permasalahan tersebut dan menyusun langkah-langkah strategis sebagai tindak lanjut yang dapat direkomendasikan kepada atasan sebagai upaya optimalisasi penggunaan KKP dan CMS VA. Konsep Optimalisasi yang dimaksud dalam penelitian ini memiliki arti sebagai proses atau tindakan yang dilakukan secara terencana untuk mendapatkan solusi dan hasil yang terbaik untuk mencapai tujuan penelitian.

B. Identifikasi Masalah

Selanjutnya, berlandaskan dari penjelasan latar belakang permasalahan di atas terhadap penggunaan KKP dan CMS VA di Pusbangkom Manajemen BPSDM PUPR yang belum berjalan optimal, maka penulis merangkum identifikasi permasalahan yang didapatkan yaitu :

1. Pembayaran dengan menggunakan uang tunai masih tinggi, sehingga realisasi dalam penggunaan KKP dan CMS VA sangat rendah;
2. Adanya temuan BPK terkait penatausahaan kas oleh Bendahara Pengeluaran;
3. Adanya temuan Itjen terkait kurangnya pemanfaatan belanja negara melalui platform elektronik dengan menggunakan KKP dan CMS VA;
4. Kurangnya komitmen dan peran aktif dari pimpinan dalam mendorong sistem pembayaran non tunai melalui penggunaan KKP dan CMS VA;
5. Sulitnya mengubah *mindset* dan kebiasaan pembayaran konvensional menjadi pembayaran elektronik;
6. Terbatasnya Jumlah dan kompetensi SDM akan pemahaman akan regulasi penggunaan dan pertanggungjawaban KKP dan CMS VA;
7. Tidak adanya standarisasi atau template yang baku terkait SOP penggunaan KKP dan CMS VA. Saat ini satker belum menyusun SOP untuk keduanya, penggunaan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan, sehingga potensi salah persepsi dalam mengartikan pasal per pasal bisa saja terjadi.
8. Kendala Teknis dari penggunaan KKP dan CMS VA : kurangnya *merchant* yang menyediakan mesin *EDC* dan adanya biaya *surcharge*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas dalam identifikasi masalah, maka penelitian ini menitikberatkan pada rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana implementasi penggunaan KKP dan CMS VA Pada Satker Pusbangkom Manajemen BPSDM PUPR sejak tahun 2019 sampai saat ini?
2. Faktor apa saja yang mengakibatkan penggunaan KKP dan CMS VA Pada Satker Pusbangkom Manajemen BPSDM PUPR belum berjalan optimal ?
3. Strategi apa yang dapat disusun dalam upaya optimalisasi Penggunaan KKP dan CMS VA di Satker Pusbangkom Manajemen BPSDM PUPR ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi dalam penggunaan KKP dan CMS VA Pada Satker Pusbangkom Manajemen BPSDM PUPR mulai tahun 2019 sampai saat ini;
2. Untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan penggunaan KKP dan CMS VA Pada Satker Pusbangkom Manajemen BPSDM PUPR belum berjalan optimal;
3. Untuk menyusun langkah strategi optimalisasi dalam bentuk rekomendasi SOP KKP dan CMS VA serta Nota Dinas yang akan diterapkan di Lingkungan Satker Pusbangkom Manajemen BPSDM PUPR.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi akademis maupun praktis . Adapun penjelasan manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi aspek akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan para pembaca khususnya terkait teori optimalisasi dan landasan kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KPP) dan Cash Management System Virtual Account (CMS VA), tentunya kedua hal ini menjadi relevan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan KKP dan CMS VA sebagai alat pembayaran belanja pemerintah, sekaligus memberikan kontribusi dalam ilmu terapan konsentrasi Manajemen Keuangan Negara. Selain itu, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pimpinan dan pejabat perbendaharaan lainnya pada Satker Pusbangkom Manajemen BPSDM PUPR dalam melakukan perbaikan dan pengambilan alternatif keputusan terkait optimalisasi penggunaan KKP dan CMS VA sebagai alat pembayaran belanja negara, sehingga penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam menyusun SOP Tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban KKP dan CMS VA, serta berdampak pada pengelolaan keuangan satker yang lebih baik dimasa yang akan datang.